

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian secara kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada AKN II BPK RI dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dijelaskan pada paragraf berikutnya.

Manajemen pemeriksaan pada AKN II mencakup kegiatan perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh AKN II. AKN II telah melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan serta sesuai dengan kebutuhan pemilik kepentingan.

Upaya pengendalian mutu pemeriksaan mencakup semua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan. Melalui pemeriksaan yang terintegrasi, AKN II berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan biaya pemeriksaan yang optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi.

AKN II telah melaksanakan praktik yang baik terkait pemeriksaan yaitu penggunaan Portal Kolaborasi AKN II dalam pengelolaan KKP seluruh

pemeriksaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Tim pemeriksa AKN telah berusaha melaksanakan pemeriksaan sesuai standar dan pedoman pemeriksaan yang ada, namun berdasarkan hasil observasi dan revidi dokumen yang diuji petik oleh Peneliti adalah LHP LKKP Tahun Anggaran 2018 yang diperiksa pada Tahun 2019 dapat diyakini bahwa tim pemeriksa AKN II belum sepenuhnya mengimplementasikan langkah-langkah pemeriksaan yang dipersyaratkan. Peneliti juga mengidentifikasi area perbaikan untuk peningkatan kualitas pemeriksaan, yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Pemeriksaan

Pada tahap ini hasil penelitian, observasi, dan dokumen menunjukkan bahwa Tim Pemeriksa AKN II telah melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan SPKN dan PMP. Artinya Tim Pemeriksa AKN II sudah mampu menerapkan SPKN dan PMP dalam langkah-langkah yang ada pada tahapan perencanaan ini

2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada tahap pelaksanaan pemeriksaan ini ditemukan pelaksanaan revidi berjenjang belum dilaksanakan secara optimal, sehingga ditemukan dokumen yang belum di paraf, dikasih tanggal, dan belum diinputkan ke dalam portal sehingga terdapat beberapa KKP yang belum terdokumentasikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tahapan pelaksanaan, perbaikan atas pelaksanaan prosedur perlu

segera ditingkatkan dalam rangka menghasilkan LHP yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan

3. Tahap Pelaporan Pemeriksaan

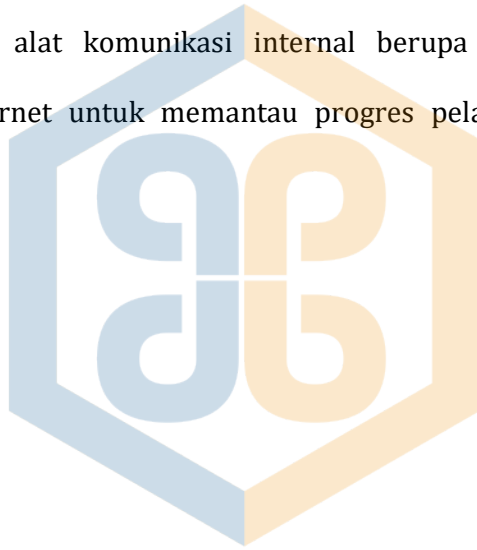
Pada tahap ini hasil penelitian, observasi, dan telaah dokumen menunjukkan bahwa Tim Pemeriksa AKN II telah melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan SPKN dan PMP.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran dari Peneliti kepada Eselon I sebagai Pejabat Struktural Pemeriksa tertinggi pada AKN II adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Eselon I memerintahkan Pejabat terkait untuk berkoordinasi dengan Biro Teknologi Informasi BPK RI untuk menyusun suatu aplikasi berbasis web yang terintegrasi dan dapat digunakan untuk setiap jenis pemeriksaan dalam pengelolaan kertas kerja pemeriksaan dimana setiap langkah pemeriksaan harus dilaksanakan dan disajikan secara lengkap.
2. Dalam tahap reviu, Pengendali Teknis wajib melakukan validasi atas reviu yang dilakukan melalui portal Kertas Kerja Pemeriksaan sehingga tidak ada lagi reviu secara lisan. Tujuannya agar jejak reviu terdokumentasikan dengan baik. Reviu dilakukan sejak tahap perencanaan dan pelaporan serta selanjutnya pada tahap menyajikan KKP tersebut dengan melengkapi dokumentasi pemeriksaan serta pemberian referensi silang pada KKP; dan

3. Memastikan setiap KKP tidak dapat disimpan oleh Tim Pemeriksa di dalam portal AKN II bila langkah-langkah pemeriksaan belum lengkap.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemeriksaan, antara lain pemanfaatan portal satker untuk memantau dan melakukan reviu secara berjenjang atas proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. Pemanfaatan alat komunikasi internal berupa radio digital dengan jaringan internet untuk memantau progres pelaksanaan pemeriksaan (field audit).



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

O'Leary, Daniel E., *Big Data and Knowledge Management with Applications in Accounting and Auditing: The Case of Watson* (June 27, 2018). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3203842> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3203842>

Cziffra, Johnathon and Fortin, Steve and Singer, Zvi, *The Effects of Audit Market Concentration and Auditor Reputation on Audit Quality: Evidence from Government Auditors* (March 17, 2019). 2019 Canadian Academic Accounting Association (CAAA) Annual Conference, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3202959> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3202959>

Sutopo, Bambang; Wulandari, Trisninik Ratih; Adiati, Arum Kusumaningdyah; and Saputra, Dany Adi, *E-Government, Audit Opinion, and Performance of Local Government Administration in Indonesia*, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 11(4), 2017, 6-22. doi:10.14453/aabfj.v11i4.2

Bambang Pamungkas, Reisya Ibtida & Cendy Avrian | (2018) *Factors influencing audit opinion of the Indonesian municipal governments' financial statements*, Cogent Business & Management, 5:1, 1540256, DOI: 10.1080/23311975.2018.1540256

Lestari, M. A., T. S., & Rahman, A. F. (2020). *Auditors' professional commitment, time budget pressure, independence, and audit quality: The Audit Board of the Republic of Indonesia Experience*. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 9(6), 263–273. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i6.919>

Lex et Societatis, Vol. III/No. 7/Ags/2015, Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Sandag, Allan Peter. *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003*. Lex Administratum, Vol. III/No. 8/Okt/2015.

B. Buku

- Kuntadi, Cris. 2019. *Audit Internal Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Afifuddin. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Domai, Tjahjanulin. 2010. *Manajemen Keuangan Publik*. Malang: UB Press.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, Abdul. 2017. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

C. Sumber Lain

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I- XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Standar Akuntansi Pemerintah
- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman
Manajemen Pemeriksaan

Pedoman Manajemen Pendukung Pemeriksaan

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaaan LKKL/LKPP/LKBUN

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan

Pedoman Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA KEY INFORMAN (ESELON I/PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN)

MANAJEMEN PEMERIKSAAN PADA AUDITORAT KEUANGAN NEGARA II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin : Laki-Laki
2. Umur :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Lama Bekerja :
5. Jabatan :

B. PERENCANAAN PEMERIKSAAN

1. Apakah Saudara telah melakukan reviu dan menetapkan usulan Tim Pemeriksaan berdasarkan pertimbangan dari Pejabat Fungsional Pemeriksa?
2. Apakah Saudara melakukan reviu atas kesesuaian proses penyusunan Program Pemeriksaan (P2) dengan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP)? Bagaimana cara Saudara mereviu P2 tersebut? Mohon jelaskan jawabannya.
3. Apakah Saudara juga mengevaluasi kesesuaian konsep P2 dengan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP)? Bagaimana cara Saudara mengevaluasinya? Mohon jelaskan jawaban Saudara.

4. Atas Tim Pemeriksaan yang terbentuk, apakah Saudara mereviu kembali dan memberikan persetujuan usulan susunan tim tersebut?

C. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Apakah Saudara melakukan reviu atas usulan penggunaan tenaga Ahli sebelum disetujui? Apakah salah satu dasar reviu adalah ketersediaan dana? Mohon jelaskan jawaban Saudara.
2. Apakah Saudara mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (LAPPL) yang disusun oleh Tim dan telah direviu berjenjang mulai dari Pengendali Teknis? Bagaimana cara Saudara mengevaluasinya? Mohon jelaskan jawaban Saudara.

D. PELAPORAN PEMERIKSAAN

1. Apakah Saudara memastikan tanggapan diperoleh dari entitas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan?
2. Bagaimana Saudara melakukan pemerolehan keyakinan mutu untuk memastikan pengendalian mutu telah dilakukan secara berjenjang oleh PFP sesuai dengan SPKN dan tahapan dalam PMP?
3. Apakah Saudara memastikan ketepatan waktu penyerahan LHP?

**PEDOMAN WAWANCARA KEY INFORMAN
(ESELON II/WAKIL PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN)
MANAJEMEN PEMERIKSAAN
PADA AUDITORAT KEUANGAN NEGARA II
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

A. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin : Laki-laki
2. Umur :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Lama Bekerja :
5. Jabatan :

B. PERENCANAAN PEMERIKSAAN

1. Apakah Saudara/i mereviu LHPP (termasuk persetujuan penggunaan tenaga ahli bila ada)? Apakah LHPP tersebut juga Saudara/i setuju?
2. Apakah Saudara/i mengarahkan penyusunan P2? Bagaimana cara anda mengarahkannya? Mohon jelaskan jawaban Saudara/i.
3. Apakah anda melakukan reviu dan selanjutnya menyetujui substansi konsep P2 yang disampaikan pengendali Teknis? Bagaimana cara Saudara/i melakukan reviu tersebut? Mohon jelaskan jawaban Saudara/i.
4. Apakah Saudara/i memastikan materi konsep P2 telah memenuhi Harapan penugasan?
5. Bagaimana cara Saudara/i mengevaluasi kesesuaian konsep P2 dengan RKP?

6. Apakah Saudara/i mengarahkan susunan Tim Pemeriksaan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan?

C. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Apakah Saudara/i telah memastikan bahwa harapan, tujuan, lingkup pemeriksaan, jadwal waktu, kebutuhan dokumen yang diperiksa dan komposisi Tim Pemeriksaan telah dikomunikasikan pada entitas saat pertemuan awal?
2. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh KT atau Pengendali Teknis, apakah anda memberikan pengarahan terhadap pemeriksaan yang dilakukan?
3. Apakah Saudara/I memastikan harapan, tujuan, dan lingkup pemeriksaan telah terpenuhi?
4. Apakah Saudara/I memastikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang terkait, PMP dan Kode Etik?
5. Apakah Saudara/I melakukan revidi dan selanjutnya menyetujui usulan penggunaan tenaga ahli dalam pemeriksaan (bila diperlukan)? Bagaimana cara Saudara/I merevidinya? Mohon dijawab dengan jelas.
6. Bila terjadi perubahan P2, bagaimana cara Saudara/I merevidi dan menyetujui usulan perubahan tersebut? Mohon jelaskan jawaban Saudara/i.
7. Apakah Saudara/I merevidi usulan perpanjangan waktu pemeriksaan dan/atau penambahan pemeriksa (apabila diperlukan)?
8. Apakah Saudara/I memastikan relevansi antar unsur-unsur TP?

9. Apakah Saudara/I juga mereviu kesesuaian TP (termasuk usulan indikasi kerugian Negara/daerah dan/atau unsur pidana yang disampaikan Pengendali Teknis) dengan pedoman pemeriksaan?
10. Apakah reviu atas ketepatan TP yang berindikasi kerugian Negara telah didukung dengan bukti yang cukup? Bagaimana Saudara/I menyakini temuan tersebut? Mohon jelaskan jawaban Saudara/i.
11. Apakah Saudara/I selalu melakukan reviu terlebih dahulu dan selanjutnya menyetujui usulan permintaan pendapat hukum atas konsep TP yang berindikasi kerugian Negara/daerah?
12. Bagaimana cara Saudara/I mereviu alasan atas TP yang tidak layak/batal (yang disampaikan oleh Ketua Tim dan Pengendali teknis)? Mohon jelaskan jawabannya.
13. Apakah Saudara/I selalu memastikan bahwa TP tidak layak/batal telah didokumentasikan dan didukung dengan alasan dan analisis yang memadai (yang diusulkan oleh Ketua Tim dan pengendali Teknis)?
14. Apakah Saudara/I telah Memastikan bahwa temuan pemeriksaan telah dikomunikasikan dengan entitas?
15. Apakah Saudara/I mengarahkan proses pelaporan pemeriksaan lapangan berdasarkan LAPPL?
16. Apakah Saudara/I memastikan bahwa Pengendali Teknis telah mengisi lembar penilaian kinerja Ketua Tim?

D. PELAPORAN PEMERIKSAAN

1. Apakah Saudara/I selalu mereviu kesesuaian Pelaksanaan Pemeriksaan dengan SPKN? Bagaimana cara Saudara melakukannya?

2. Bagaimana cara Saudara/I memastikan ketepatan waktu penyelesaian LHP sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam P2?
3. Apakah Saudara/I mereviu usulan pelaporan informasi rahasia, indikasi kerugian negara/daerah dan unsur pidana?
4. Bagaimana Saudara/I melakukan reviu atas TP yang tidak layak/batal (yang disampaikan oleh Ketua Tim dan pengendali teknis)? Alasan apa sajakah yang bisa menjadi latar belakang suatu TP dianggap tidak layak/batal?
5. Alasan apakah yang melatarbelakangi Saudara/I untuk memberikan persetujuan permintaan pendapat hukum kepada Ditama Binbangkum bila suatu TP diperlukan pendapat hukum?
6. Bila diperlukan prosedur tambahan, apakah Saudara/I mereviu terlebih dahulu usulan tersebut?
7. Apakah Saudara/I mereviu hasil telaah tanggapan dan rencana aksi dari Pengendali Teknis? Apakah Saudara/I juga memberikan masukan atas rekomendasi yang diberikan?
8. Apakah Saudara/I melakukan reviu dan menandatangani konsep LHP?

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**PEDOMAN WAWANCARA KEY INFORMAN
(ESELON III/PENGENDALI TEKNIS PEMERIKSAAN)
MANAJEMEN PEMERIKSAAN
PADA AUDITORAT KEUANGAN NEGARA II
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

A. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin :
2. Umur :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Lama Bekerja :
5. Jabatan :

B. PERENCANAAN PEMERIKSAAN

1. Apakah Saudara telah melakukan reviu atas LHPP dan hasil identifikasi kebutuhan tenaga ahli (bila ada)?
2. Bagaimana cara Saudara mereviu kesesuaian konsep P2 dengan Juklak dan Juknis yang ada dan berhubungan dengan Pemeriksaan yang akan dilakukan? Mohon jelaskan jawaban Saudara.
3. Bagaimana cara Saudara mereviu ketepatan metodologi yang akan digunakan dalam Pemeriksaan? Mohon jelaskan jawaban Saudara.
4. Apakah Saudara terlibat dalam mengarahkan Anggota Tim menyusun konsep PKP?

C. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Apakah Saudara selalu memastikan isi notulen entry meeting sesuai dengan Pertemuan Awal? Bila Saudara tidak melakukannya, siapa yang memastikan isi notulen entry meeting?

2. Apakah Saudara selalu membaca laporan Mingguan yang disusun oleh Ketua Tim? Apakah Saudara selalu memberikan pengarahan pemeriksaan melalui Laporan Mingguan yang disampaikan oleh Ketua Tim tersebut?
3. Berdasarkan laporan mingguan yang diterima dari Ketua Tim, Apakah saudara sebagai Pengendali Teknis melakukan reviu atas prosedur pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan oleh Tim Pemeriksa telah didukung oleh justifikasi dan analisis yang memadai? Mohon jelaskan jawaban Saudara/i.
4. Berdasarkan laporan mingguan yang disusun oleh Ketua Tim, Apakah Pengendali Teknis melakukan reviu kecukupan prosedur?
5. Apakah Saudara/I rutin melakukan reviu atas KKP yang disusun oleh Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa?
6. Apakah Saudara/I selalu memastikan kebenaran dan ketepatan informasi yang dimuat di coversheet dan HP3 yang disusun oleh Ketua Tim dan Anggota Tim Pemeriksa?
7. Apakah Tim Pemeriksa selalu membutuhkan bantuan tenaga Ahli? Bila Tim Pemeriksa membutuhkan, bagaimana Saudara/I mereviu usulan penggunaan tersebut dalam pemeriksaan terkait kesesuaiannya dengan tujuan dan lingkup pemeriksaan? Mohon jelaskan jawaban Saudara/i.
8. Bagaimana cara Saudara melakukan reviu validitas substansi dan kebenaran matematis dalam TP untuk nilai-nilai yang material (termasuk usulan indikasi kerugian Negara/daerah dan unsur pidana yang disampaikan Ketua Tim)? Mohon jelaskan jawabannya.
9. Apakah Saudara/I mereviu ketepatan atas identifikasi informasi rahasia yang diusulkan oleh Ketua Tim?

10. Bagaimana cara Saudara/I melakukan revidasi atas alasan usulan suatu TP yang tidak layak/batal (yang diusulkan)? Mohon jelaskan jawaban Saudara/i.
11. Apakah Saudara/I selalu memastikan bahwa TP tidak layak/batal telah didokumentasikan dan didukung dengan alasan dan analisis yang memadai (yang diusulkan oleh Ketua Tim)?
12. Bagaimana Saudara/I merevisi ketepatan penggunaan bahasa dalam TP dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar?
13. Bagaimana cara saudara/I memastikan TP yang berindikasi terdapat kerugian Negara/daerah dan unsur pidana telah memenuhi kriteria berpotensi merugikan Negara/daerah atau memiliki unsur pidana? Apakah atas TP tersebut dilakukan revidasi dan dipastikan telah didukung dengan bukti yang memadai? Mohon jelaskan jawaban Saudara/i.
14. Bagaimana Saudara/I memastikan bahwa TP yang disusun oleh Tim Pemeriksa telah dikomunikasikan dengan entitas?
15. Apakah Saudara/i selalu merevisi LAPPL dari Tim Pemeriksa?
16. Apakah Saudara/I memastikan Ketua Tim telah mengisi lembar penilaian kinerja Anggota Timnya?

D. PELAPORAN PEMERIKSAAN

1. Apakah Saudara/I melakukan revidasi atas konsep LHP dan usulan pelaporan informasi rahasia, indikasi kerugian Negara/Daerah dan/atau unsur pidana (apabila ada) yang disampaikan oleh Ketua TIM? Bagaimana cara Saudara/I melakukan revidasi tersebut? Mohon jelaskan jawaban Saudara/i.

2. Bagaimana Saudara/I menjamin terpenuhinya unsur-unsur temuan pemeriksaan yaitu kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi sesuai dengan SPKN?
3. Bagaimana Saudara/I menjamin kesesuaian penggunaan bahasa dalam LHP dengan ketentuan yang berlaku?
4. Apakah Saudara/1 telah melakukan reviu hasil telaah tanggapan dan rencana aksi dari Ketua Tim?



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**PEDOMAN WAWANCARA KEY INFORMAN
(PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA/KETUA TIM PEMERIKSAAN)
MANAJEMEN PEMERIKSAAN
PADA AUDITORAT KEUANGAN NEGARA II
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

A. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin :
2. Umur :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Lama Bekerja :
5. Jabatan :

B. PERENCANAAN PEMERIKSAAN

1. Bagaimana Saudara merancang prosedur yang akan dilaksanakan dalam P2 dan prosedur tersebut dapat memenuhi Tujuan dan Harapan Penugasan yang telah ditentukan?
2. Apakah Saudara/I melakukan rewiu atas konsep Program Kerja Perorangan (PKP) yang disusun oleh setiap Anggota Tim dan selanjutnya menyetujui PKP tersebut?

C. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Apakah Sandara/I memastikan permintaan dokumen awal telah disampaikan kepada entitas sebelum entry meeting (pertemuan awal)?
2. Apakah Saudara/I telah memastikan isi notulen sesuai dengan pertemuan awal?

3. Bagaimana cara Saudara/I memastikan seluruh prosedur pemeriksaan dalam P2 telah dilaksanakan?
4. Apakah Saudara/I telah memastikan relevansi antara konsep TP dengan bukti pendukung pemeriksaan terkait?
5. Apakah Saudara/I sebagai Ketua Tim telah memastikan P2 telah dilakukan sesuai juklak dan juknis pemeriksaan terkait?
6. Apakah Saudara/I selalu memastikan kebenaran matematis dan akurasi angka dalam KKP? Apakah KKP tersebut anda review terlebih dahulu?
7. Apakah Saudara/I sebagai Ketua Tim selalu memastikan kecukupan bukti pendukung atas TP yang ada?
8. Apakah Saudara/I selalu mereview keandalan bukti atas TP yang ada? Bagaimana cara? Mohon jelaskan jawaban Saudara/i.
9. Apakah Saudara/I selalu memastikan bahwa setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh Anggota Tim ada dalam P2 dan telah dilengkapi dengan HP3?
10. Apakah Saudara/I telah memastikan bahwa KKP yang disusun dilengkapi dengan coversheet dan coversheet tersebut dapat ditelusuri ke KKP yang relevan?
11. Apakah Saudara/I dapat menjamin kebenaran matematis dan validitas substansi dalam TP?
12. Apakah Saudara/I sebagai Ketua Tim memastikan relevansi konsep TP dengan bukti Pendukung pemeriksaan yang ada?
13. Apakah Saudara/I sebagai Ketua Tim memastikan TP yang disusun oleh Anggota Tim telah memenuhi unsur-unsur judul, kondisi, kriteria, sebab, dan akibat?

14. Apakah Saudara/I memastikan seluruh TP telah diinput ke dalam Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP)?
15. Apakah Saudara/I telah memastikan isi notulen sesuai dengan pembahasan TP yang dilakukan?

D. PELAPORAN PEMERIKSAAN

1. Apakah Saudara/I telah memastikan validitas substansi, kebenaran matematis, dan akurasi angka atas bahan penyusunan LHP?
2. Apakah Saudara/I telah melakukan penelaahan atas tanggapan dan rencana aksi yang disampaikan entitas?



**PEDOMAN WAWANCARA KEY INFORMAN
(PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA/ANGGOTA TIM PEMERIKSAAN)
MANAJEMEN PEMERIKSAAN
PADA AUDITORAT KEUANGAN NEGARA II
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

A. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin :
2. Umur :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Lama Bekerja :
5. Jabatan :

B. PERENCANAAN PEMERIKSAAN

1. Apakah Saudara/I terlibat dalam pengumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan Ketua Tim untuk menyusun P2? Bagaimana Saudara/i mendapatkan dokumen pendukung tersebut?
2. Apakah Saudara/I melakukan penyusunan Konsep Program Kerja Perorangan (PKP)? Apakah PKP yang Saudara/I susun telah direviu dan disetujui oleh Ketua Tim?

C. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Apakah Sandara/I memastikan permintaan dokumen awal telah disampaikan kepada entitas sebelum entry meeting (pertemuan awal)?
2. Apakah Saudara/I telah memastikan isi notulen sesuai dengan pertemuan awal?

3. Bagaimana cara Saudara/I memastikan seluruh prosedur pemeriksaan dalam P2 telah dilaksanakan? Jelaskan jawaban Saudara/i.
4. Apakah Saudara/I telah memastikan relevansi antara konsep TP yang disusun dengan bukti pendukung pemeriksaan terkait?
5. Apakah Saudara/I telah memastikan langkah-langkah pada P2 telah dilakukan sesuai juklak dan juknis pemeriksaan terkait?
6. Apakah Saudara/I selalu memastikan kebenaran matematis dan akurasi angka dalam KKP? Apakah KKP tersebut anda susun sesuai dengan Pedoman Penyusunan KKP?
7. Apakah Saudara/I selalu memastikan kecukupan bukti pendukung atas TP yang ada?
8. Apakah Saudara/I mereviu keandalan bukti atas TP yang ada? Bagaimana cara Saudara/I melakukannya? Mohon jelaskan jawabannya.
9. Apakah Saudara/I selalu memastikan bahwa setiap langkah-langkah yang dilakukan ada dalam P2 dan telah dilengkapi dengan HP3?
10. Apakah Saudara/I telah memastikan bahwa KKP yang disusun dilengkapi dengan coversheet dan coversheet tersebut dapat ditelusuri ke KKP yang relevan?
11. Apakah Saudara/I dapat menjamin kebenaran matematis dan validitas substansi dalam TP?
12. Apakah Saudara/I memastikan relevansi konsep TP dengan bukti Pendukung pemeriksaan yang ada?
13. Apakah Saudara/I telah menyusun TP yang memenuhi unsur-unsur judul, kondisi, kriteria, sebab, dan akibat?

14. Apakah Saudara/I telah menginputkan TP ke dalam Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP)?

15. Apakah Saudara/I telah membuat notulen Pembahasan TP?

D. PELAPORAN PEMERIKSAAN

1. Apakah Saudara/I telah memastikan dokumen pendukung atas bahan penyusunan LHP telah lengkap?
2. Apakah Saudara/I telah melengkapi PKP dengan dokumen pendukung dan atas PKP tersebut telah dilakukan reviu yang memadai?
3. Apakah Saudara/I telah melakukan pengumpulan bahan untuk IHPS?

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

NO	DOKUMEN	YANG DITELAAH
1.	Peraturan Hukum yang memuat tentang Keuangan Negara	PAKET UNDANG-UNDANG KEUANGAN NEGARA 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2.	Peraturan Hukum tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
3.	Peraturan terkait tentang Auditorat Keuangan Negara II BPK RI	Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I- XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

4.	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang menjadi pedoman dalam Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa AKN II BPK RI	Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017
5.	Panduan Manajemen Pemeriksaan yang berlaku di AKN II BPK RI	Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan
6.	Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Negara yang menjadi acuan pelaksanaan pemeriksaan di lapangan	1. Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2. Petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan keuangan
7.	Pedoman Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan pada Tahun 2019	Pedoman Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan

PEDOMAN OBSERVASI (PENGAMATAN)

NO	DOKUMEN	YANG DIOBSERVASI
1.	Program pemeriksaan	Program pemeriksaan perorangan
2.	Dokumen hasil pemeriksaan	1. Kertas Kerja Pemeriksaan A 2. Kertas Kerja pemeriksaan B 3. Kertas Kerja Pemeriksaan C
3.	Dokumentasi surat menyurat	1. Surat Tugas 2. Surat pemberitahuan pemeriksaan 3. Surat permintaan dokumen 4. Surat penyampaian Temuan Pemeriksaan 5. Surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A